

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS SEHUBUNGAN
DENGAN PEMBUATAN COVERNOTE (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5710K/PID.SUS/2023)**

TESIS

***Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan***



Oleh :

ALEXS ALFA DINATA

NIM. 2220122079

Pembimbing :

Prof Dr. Elwi Danil S.H., M.H

Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

Pertanggungjawaban Pidana Notaris Sehubungan dengan Pembuatan *Covernote* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5710k/Pid.Sus/2023)

Alexs Alfa Dinata, 2220122079, Program Studi Magister Kenotariatan
Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas

Abstrak

Notaris merupakan seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus yang diatur dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta dan Notaris juga berwenang untuk membuat akta terkait pertanahan. Terseretnya Notaris Elviera atas penyertaan tindak pidana korupsi karena telah menerbitkan *covernote* dalam proses pencairan kredit yang diajukan oleh PT. KAYA di Bank BTN Cabang Medan, dimana *covernote* tersebut menerangkan bahwa Notaris Elviera telah menerima 93 SHGB yang akan menjadi agunan kredit, padahal kenyataannya dari 93 SHGB yang akan dibalik nama dan diletakkan hak tanggungan, hanya 5 SHGB yang dibaliknamakan atas nama PT. KAYA dan dilekatkan dengan hak tanggungan. Sedangkan sisanya tidak dilakukan balik nama dan tidak pula dilekatkan hak tanggungan karena PT. KAYA (debitur) tidak menyetor BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PPh (Pajak Penghasilan) sebagai syarat untuk balik nama untuk selanjutnya dilekatkan dengan hak tanggungan, dimana proses balik nama dan melekatkan dengan hak tanggungan adalah tanggungjawab dari terdakwa Elviera selaku Notaris/PPAT yang mempunyai kontrak kerja dengan Bank BTN Cabang Medan. Sehingga atas peran Notaris Elviera yang menerbitkan *covernote* untuk proses pencairan kredit tersebut menurut majelis hakim dapat diklasifikasikan memberikan bantuan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Membuat janggal penulis dalam kasus yang melibatkan Notaris Elviera tersebut adalah karena pokok persoalan tidak dilakukannya balik nama dan diletakkannya hak tanggungan dalam perkara tersebut karena PT. KAYA (debitur) tidak mau membayar BPHTB dan pajak terkait, padahal ia telah menerima dan menikmati fasilitas kredit dari Bank BTN Cabang Medan sejumlah Rp.39.500.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah). Sehingga pertanyaannya 1. Bagaimana kepastian hukum *covernote* yang dibuat oleh Notaris terhadap pihak dalam transaksi kredit perbankan. 2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Notaris yang membuat *covernote* dalam perjanjian kredit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5710k/Pid.Sus/2023). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan masalah Yuridis Normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan Undang-undang (*statue approach*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk teori yang digunakan adalah teori tanggungjawab hukum, teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Hasil dari rumusan masalah pertama, *covernote* tidak mempunyai kepastian hukum karena tidak ada satupun pasal atau ayat yang menjelaskan bahwa Notaris membuat atau menerbitkan *covernote* sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai kewenangan Notaris. Kedua, Pertimbangan Hakim dalam kasus Elviera sebaiknya mempertimbangkan Aspek Non-Yuridis, yang menjadi dasar pertimbangan hakim, berguna untuk mengkaji latar belakang sosioal seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Notaris, *Covernote* dan Pencairan Kredit.

Criminal Liability of Notaries in Connection with the Preparation of Covernotes (Study of Supreme Court Decision Number 5710K/Pid.Sus/2023)

Alexs Alfa Dinata, 2220122079, Master of Notary Study Program
Postgraduate Program, Faculty of Law, Andalas University

Abstract

A notary is a public official with special authority regulated by a specific law, namely the Notary Office Law. Notaries have the authority to issue deeds and are also authorized to issue deeds related to land matters. Notary Elviera was implicated in a corruption case for issuing a covernote in the process of disbursing a loan applied for by PT. KAYA at Bank BTN Branch Medan, where the covernote stated that Notary Elviera had received 93 SHGBs to be used as loan collateral, whereas in reality, out of the 93 SHGBs that were supposed to be transferred and encumbered, only 5 SHGBs were transferred to PT. KAYA and encumbered. The remaining SHGBs were not transferred and no mortgage rights were attached because PT. KAYA (the debtor) did not pay the BPHTB (Land and Building Acquisition Tax) and PPh (Income Tax) as requirements for the transfer of ownership, which is followed by the attachment of a mortgage. The process of transferring ownership and attaching a mortgage is the responsibility of the defendant Elviera as a Notary/PPAT who has a work contract with Bank BTN Branch Medan. Therefore, the court ruled that Notary Elviera's role in issuing the covernote for the loan disbursement process could be classified as aiding and abetting the commission of a corruption offense. What is puzzling to the author in the case involving Notary Elviera is that the core issue is the failure to transfer the title and attach the mortgage in the case because PT. KAYA (the debtor) refused to pay the BPHTB and related taxes, even though it had received and enjoyed credit facilities from Bank BTN Medan Branch amounting to Rp.39,500,000,000.00 (thirty-nine billion five hundred million rupiah). Therefore, the questions are: 1. How is the legal certainty of the covernote made by the Notary for the parties in the banking credit transaction. 2. How is the Judge's Consideration in imposing a criminal penalty on the Notary who made the covernote in the credit agreement (Study of Supreme Court Decision Number: 5710k / Pid.Sus / 2023). In this study, the researcher used the Normative Juridical problem approach method with a case approach (case approach) and a Statute approach (statue approach). The data sources used are secondary data with primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. For the theories used are the theory of legal responsibility, the theory of legal certainty and the theory of legal protection. The results of the first problem formulation, the covernote does not have legal certainty because there is not a single article or paragraph that explains that the Notary makes or publishes a covernote as regulated in Article 15 of Law Number 2 of 2014 regarding the amendment to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries regarding the authority of the Notary. Second, the judge's considerations in the Elviera case should consider non-juridical aspects, which are the basis for the judge's considerations, useful for examining social backgrounds such as education, residential environment and work, as well as knowing the defendant's motives for committing a crime.

Keywords : Notary Liability, Covernote and Loan Disbursement.